# BAB I

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Penelitian**

Semangat Korea Utara dalam mengembangkan nuklir adalah untuk mempertahankan rezim.[[1]](#footnote-1) Sebagai rezim yang berupaya untuk bertahan dalam sistem internasional, setelah perang Korea berakhir tidak lantas memberikan jaminan aman dan damai pada dua negara melainkan hanya sebatas menyepakati perjanjian gencatan senjata. Korea Utara masih merasa terancam dengan ditempatkannya kurang lebih 27 ribu tentara AS di Korea Selatan, ditambah 47 ribu tentara AS lainnya di Jepang. Hal tersebut yang kemudian membuat Korea Utara semakin yakin mengembangkan teknologi nuklirnya. Belajar dari pengalaman China yang pada dekade 1950-an mengalami tiga kali ancaman serangan nuklir dari AS, membuat pemerintah Korea Utara merasa waswas terhadap AS.[[2]](#footnote-2) Selain itu, Korea Utara juga melihat bahwa nuklir nantinya dapat digunakan sebagai sebuah instrumen yang berfungsi untuk memeras negara-negara di sekitarnya guna memberikan bantuan ekonomi pada Korea Utara. Munculnya desakan dari pihak lain untuk menghentikan program nuklirnya mampu dimanfaatkan Korea Utara untuk meminta imbalan bantuan dari China atau Korea Selatan juga Jepang.

Pengembangan teknologi nuklir Korea Utara merupakan salah satu langkah dalam memperkuat militernya menjadi sebab utama mengapa kemudian Korea Utara memutuskan untuk mengembangkan teknologi nuklir. Menurut Korea Utara, kekuatan militer konvensional saja belum cukup. Menurut Tan Er-Win terdapat beberapa skenario yang melatar belakangi pengembangan teknologi senjata nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara. Pertama, Pyongyang sedang gencar melakukan usaha untuk menjalin komunikasi dengan Korea Selatan yang selama ini saling bermusuhan, kedua adalah Korea Utara ingin mendapat perhatian dari pihak AS. Ketiga, pemerintahan Korea Utara bermaksud untuk memperkuat legitimasi politik Kim Jong Un, selaku suksesor dari Kim Jong Il. Keempat, Pyongyang bermaksud mengembangkan gudang senjata nuklir untuk digunakan melawan Korea Selatan, Jepang atau bahkan AS.[[3]](#footnote-3) Program untuk mengembangkan teknologi senjata nuklir Korea Utara ini tidak main-main, mereka bahkan telah menggelontorkan banyak dana untuk program pengembangan tersebut dan juga pada bidang militer. Sejak akhir 1990-an, para perwira militer di Korea Utara pada saat itu sedang gencar mengenalkan dua doktrin militer, Kangsong Taeguk dan Songun Chongchi.[[4]](#footnote-4) Kangsong Taeguk sendiri berarti pemikiran mengenai pentingnya membangun negara yang kuat dan sejahtera, sedangkan Songun Chongchi adalah pola pikir tentang keutamaan militer.

Lebih dari pada itu, di Korea Utara berkembang paham juche yang sudah tertanam pada rakyat Korea Utara. Paham Juche menekankan bahwa Korea Utara bebas menentukan nasibnya sendiri serta tidak tergantung dengan negara lain. Juche didefiniskan sebagai bentuk dari sosialisme nasionalis khas Korea Utara yang berjuang untuk mencapai kemerdekaan dan *self-reliance* dalam berbagai bidang kehidupan. Apabila dikaitkan dengan konsep aksi reaksi, pemerintah Korea Utara mengembangkan senjata nuklirnya karena bereaksi terhadap keadaan di sekitar. Sebagaimana yang diketahui bahwa kawasan Asia Timur merupakan kawasan yang penuh dengan konflik, persaingan antar negara, seperti China dengan Taiwan, China dengan Jepang, Korea Selatan dengan Jepang dan Korea Utara dengan negara tetangganya, Korea Selatan. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan kedatangan AS yang beraliansi dengan Jepang dan Korea Selatan semakin menimbulkan kecurigaan di kawasan. Melihat hal tersebut, kemudian Korea Utara memutuskan untuk mengembangkan senjata nuklirnya dengan dalih menjaga keamanan dan kedaulatan negara dari ancaman-ancaman asing.

Akhir-akhir ini Korea Utara sering muncul di pemberitaan akibat uji coba nuklir yang dilakukannya. Bagaimana tidak, nuklir bisa menjadi senjata pemusnah massal yang tentunya mengancam kestabilan keamanan dunia internasional. Berawal dari pembangunan reaktor nuklir model Uni Soviet pada tahun 1960-an oleh Korea Utara dengan alasan hanya bertujuan untuk penelitian yang dilakukan di daerah Yongbyeon yang kemudian seiring berjalannya waktu hal tersebut meningkat menjadi isu krisis nuklir yang dianggap sebagai ancaman terhadap kemanan dan kestabilan kawasan dan internasional tentunya karena krisis nuklir ini telah menjadi isu internasional. Hal tersebut dikarenakan ketergantungan Pyongyang terhadap ekspor senjata, yang akan tetap memunculkan ancaman serius bagi upaya untuk mengendalikan semakin meluasnya penyebaran senjata “nuklir global” yang pastinya menimbulkan reaksi dari masyarakat internasional.

Krisis nuklir Korea Utara mulai terbongkar sekitar tahun 90-an dan kembali pecah pada tahun 2002, selain karena dilakukannya kembali proyek pengembangan nuklir secara rahasia dan karena skala ekonomi yang tidak besar dan skala hubungan ekonomi Korea Utara dengan Dunia Internasional yang tetap kecil. Krisis ini berimplikasi pada kebijakan politik luar negeri Korea Utara dan AS, dimana AS menghentikan pasokan bantuan bahan bakar minyak ke Korea Utara yang ditanggapi dengan penolakan inspeksi dari PBB dan memindahkan semua peralatan pemantauan fasilitas nuklirnya ke wilayah Yongbyeon.

Korea Utara atau *Democratic People’s Republic of Korea* (DPRK) yang merdeka pada tanggal 9 September 1948 ini merupakan Negara pecahan dari Semenanjung Korea atau Chosun (dalam bahasa Korea) yang terpecah menjadi dua yaitu Korea Utara dan Korea Selatan akibat Perang Dunia II. Dari sejak tahun 1945, setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom oleh AS dan pengakuan Jepang atas kekalahannya. Korea berada dibawah tekanan kekuasaan AS menyusul kepergian pasukan Jepang dan merapatnya tentara AS di pantai Timur Selatan Korea hingga Semenanjung Korea terbelah menjadi dua dan pemerintahan militer AS menguasai, Korea tetap berusaha mempertahankan kesatuan Semenanjung Korea meskipun di bawah tekanan AS.

Pada saat itu, belahan Utara Semenanjung Korea mulai melaksanakan pemerintahan militer dibawah Uni Soviet. Usaha penyatuan Negara dan bangsa Korea oleh rakyat Korea Selatan dihalang-halangi oleh pemerintahan militer AS di Korea Selatan karena pada saat itu AS dan Uni Soviet merupakan sekutu dan pembagian Semenanjung Korea tersebut telah ditetapkan dalam perundingan sekutu. Oleh sebab itu pemerintah militer AS terus membujuk pemerintah dan rakyat Korea Selatan untuk memihak AS dan menerima pembagian Semenanjung Korea.

Korea Utara merupakan Negara sosialis komunis yang mengutamakan pemenuhan kebutuhan sendiri yang dikelilingi oleh Negara-negara dengan ekonomi liberal. Selain itu bersikap tertutup, bersikeras dengan program nuklirnya, dan bersikap keras dengan resolusi-resolusi bahkan sanksi-sanksi baru bukanlah tanpa alasan melainkan tidak menginginkan adanya intervensi dari Negara lain terhadap negaranya meskipun dengan konsekuensi terisolasinya Negara ini dari dunia luar. Oleh karena itu, Korea Utara mengembangkan teknologi nuklir yang bertujuan selain untuk menjaga keamanan rezim, keamanan dalam negeri dan menekan dunia barat juga sebagai pemenuhan energi yang dibutuhkan (KEDO). Namun dengan adanya uji coba nuklir bawah tanah yang telah mereka lakukan menimbulkan keresahan tidak hanya di kawasan Asia Timur tapi juga dunia internasional, karena dampak dan ancaman yang telah dan akan muncul pasca uji coba tersebut dapat mengancam keamanan dan memunculkan konflik keamanan yang cukup serius.

Situasi internal yang meningkat di Korea Utara menciptakan ancaman internasional akan nuklir Korea Utara. China dan Uni Soviet merupakan dua Negara yang dekat dengan Korea Utara, apalagi dengan terjalinnya hubungan diplomatik antara ketiganya. Bahkan Korea Utara mendapat bantuan dari Uni Soviet dalam bidang militer, ekonomi dan teknologi. Namun, runtuhnya Uni Soviet hingga berakhirnya perang dingin berdampak pada masalah perekonomian Korea Utara, dimana hampir semua Negara mementingkan kepentingan ekonominya daripada ideologinya. Hal ini berimbas pada penurunan bantuan ekonomi yang ditujukan pada Korea Utara dari Negara-negara lain hingga perekonomian Korea Utara jatuh.

Korea Utara merupakan Negara miskin, hal tersebut diperkuat oleh beberapa faktor seperti semakin menurunnya perekonomian Negara dengan hilangnya strategi perdagangan dengan Uni Soviet, ketidakmampuannya mengimport barang-barang yang bisa menopang industri negaranya dan kekurangan energi yang dialami apalagi dengan terjadinya bencana alam besar-besaran hingga Korea Utara secara resmi meminta bantuan mayarakat internasional. Semuanya itu didukung juga dengan keputusan Korea Utara untuk mengisolasi negaranya dari dunia luar sehingga perekonomiannya tidak berkembang.

Seperti yang sempat disinggung diatas bahwa pembangunan fasilitas nuklir Korea Utara memiliki tujuan dimana salah satunya untuk memenuhi kebutuhan akan energi listrik. Korea Selatan, AS, dan Jepang melakukan perundingan supaya Korea Utara dapat mengatasi kekurangan energi. Akhirnya usul pembentukan KEDO atau Organisasi Pembangunan Energi di Semenanjung Korea diwujudkan, dan memutuskan untuk membangun sebuah stasiun pembangkit listrik tenaga nuklir di kawasan Korea Utara. Akan tetapi Korea Utara tak henti-hentinya menggunakan kartu nuklir dan peluru jarak jauh secara agresif.

Merupakan suatu hal yang tidak lazim, sebuah Negara dengan teknologi nuklir yang canggih ini harus mengandalkan bantuan dari luar untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya, diperparah dengan sanksi-sanksi yang dijatuhkan DK-PBB kepada Korea Utara yang tentu saja memperburuk perekonomian Korea Utara. Namun dengan kondisi ekonomi yang memprihatinkan seperti itu dan ketergantungannya terhadap bantuan-bantuan dari pihak luar, Korea Utara masih tetap memprioritaskan kebijakan meningkatkan kemampuan militer dan pengembangan program nuklir untuk menghadapi kemungkinan ancaman yang datang dari Negara-negara lain. Karena bagi Korea Utara militer memiliki kedudukan yang sangat dihormati tidak hanya di Korea Utara tapi juga di dunia internasional. Dan memiliki senjata nuklir yang sangat meresahkan dunia internasional tersebut suatu negara dapat meningkatkan prestige, dapat bertahan hidup dan mampu mempengaruhi negara lain.

Uji coba yang dilakukan dalam bulan Mei 1993, Korea Utara melakukan uji coba penembakan rudal Rodong-1, dengan perkiraan jarak tembak hingga 1000 km, ke arah laut Jepang. Disusul peluncuran rudal balistik melewati wilayah udara Jepang yang dinyatakan sebagai peluncuran satelit pada Agustus 1998, kemudian Oktober 2004, Juli 2006 dengan roket berjenis Nodong-2 scud B dan Taepodong II dan kemudian belum lama ini adalah uji coba nuklir pada 25 Mei 2009 yang dilakukan Korea Utara, kecaman dari dunia internasional yang ditujukan pada Korea Utara atas uji coba nuklirnya terus berdatangan hingga lahirlah resolusi-resolusi DK-PBB.

Resolusi 1695 Dewan Keamanan PBB menetapkan sanksi-sanksi yang mengharuskan semua negara mencegah pengiriman barang-barang yang berkaitan dengan rudal ke atau dari Korea Utara.[[5]](#footnote-5) Sekitar hampir tiga bulan disahkannya Resolusi Nomor 1695, pada 9 Oktober 2006 Korea Utara melakukan uji coba nuklir bawah tanah hingga akhirnya kembali ditetapkan Resolusi untuk Korea Utara, yaitu Resolusi 1718 yang disahkan pada 14 Oktober 2006 yang berisi tentang larangan bagi Korea Utara melakukan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan program nuklir dan pengembangan senjata pemusnah massal termasuk pengiriman senjata dari dan ke Korea Utara.

Pada bulan Juli 2007 Korea Utara mulai menutup fasilitas nuklirnya di Yeongbyeon hingga meyakinkan AS untuk mencabut Korea Utara dari daftar negara-negara pendukung teroris. Namun hal tersebut juga tidak berlangsung lama karena pada bulan April 2009 Korea Utara kembali meluncurkan roket jarak jauhnya.

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK-PBB) memutuskan untuk menambah dan menegaskan sanksi atas Korea Utara setelah negara itu melakukan uji nuklir kedua, akhir Mei lalu. Keputusan ini diambil melalui pemungutan suara anonim dengan hasil suara bulat, Jumat 12 Juni 2009.[[6]](#footnote-6) Resolusi tersebut adalah Resolusi DK-PBB 1874, dikarenakan proyek pengembangan nuklir Korea Utara yang tetap dijalankan dan uji coba nuklir yang berlangsung pada 25 Mei 2009. Uji coba nuklir yang berlangsung pada bulan Mei 2009 tersebut telah melanggar resolusi-resolusi sebelumnya. Desakan DK-PBB terhadap Korea Utara untuk segera mengakhiri program senjata nuklir dan peluru kendalinya malah ditanggapi Korea Utara dengan melancarkan provokasi.

Penolakan dan kecaman dunia internasional terhadap program nuklir Korea Utara terutama anggota DK-PBB yang menyetujui lahirnya resolusi-resolusi yang berisikan sanksi-sanksi yang tidak memihak Korea Utara seperti embargo-embargo ekonomi, larangan perdagangan, perundingan-perundingan dan negosiasi-negosiasi untuk membahas penghentian pengembangan senjata nuklir Korea Utara serta desakan terhadap Pyongyang untuk mencabut keputusannya menarik diri dari Traktat Non-proliferasi Nuklir (NPT) yang dilakukan Korea Utara pada tahun 2003 lalu apalagi dengan lahirnya resolusi baru DK-PBB 1874 yang notabene memiliki sanksi lebih berat dari resolusi-resolusi sebelumnya seperti larangan bagi Korea Utara untuk melakukan ekspor-impor senjata dan pemeriksaan terhadap kapal-kapal laut dan pesawat milik Korea Utara yang mencurigakan, tidak membuat Korea Utara bergeming, bahkan mereka mengancam akan meluncurkan rudal dan melakukan serangan balik sebagai reaksi dari provokasi yang dilakukan PBB maupun dari negara-negara yang menolak pengembangan nuklir Korea Utara terutama AS.

Korea Utara berpendapat bahwa memiliki senjata nuklir adalah hak dari negara-negara berdaulat agar dapat mempertahankan kebebasan bangsa, keamanan dan mencegah terjadinya perang. Hal tersebut secara tidak langsung merupakan suatu penegasan bahwa Korea Utara menolak resolusi DK-PBB yang dikeluarkan pada Juni 2009 di markas besar PBB, New York dengan suara bulat yaitu Resolusi DKPBB Nomor 1874. Di mana inti dari Resolusi tersebut adalah memperkeras sanksi terhadap Korea Utara berupa pengetatan embargo senjata dan larangan-larangan baru berkaitan dengan keuangan seperti larangan ekspor import senjata.

Kubu Korea Utara pun sudah mendengar ancaman sanksi itu. Bukannya takut, Korea Utara mengancam akan melakukan aksi militer jika AS dan sekutunya memaksakan blockade sesuai resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK-PBB). Kantor berita resmi Korea Utara, *Korean Central News Agency* (KCNA) mengutip pernyataan Departemen Luar Negeri Korea Utara yang menyatakan akan memulai proses pengayaan uranium dan mengubah seluruh plutonium mereka menjadi senjata. Berdasarkan informasi kata Departemen Luar Negeri Korea Utara, Sabtu 13 Juni 2009, seperti dikutip *Voice of America* (VOA).[[7]](#footnote-7) “Korea Utara tidak akan menghentikan program nuklirnya dan kini sedang memproses ulang tabung bahan bakar yang telah digunakan,”

Di tengah desakan internasional untuk melakukan proliferasi nuklir, Korea Utara masih terus melakukan pengembangan dan percobaan nuklir. Korea Utara memberi indikasi bahwa nuklirnya tidak sekadar digunakan untuk memenuhi kebutuhan non-senjata seperti energi, melainkan juga untuk senjata. Apa yang perlu diketahui dalam hal ini adalah rasionalitas Korea Utara dalam pengembangan nuklirnya. Rasionalitas itu yang akan membawa pemahaman tentang faktor-faktor yang menjadi alasan Korea Utara tetap bertahan dengan kebijakannya. Faktor pertama dalam rasionalitas pengembangan nuklir Korea Utara adalah model kepemimpinan yang ada. Dengan kediktatoran seorang pemimpin, proses pengambilan keputusan dilakukan secara individual.[[8]](#footnote-8) sudah berlangsung sejak masa kepemimpinan Kim Il Sung sampai Kim Jong Il dan Kim Jong Un. Ketiganya menjalankan kepemimpinan sebagai diktator yang memegang peran paling penting dalam setiap perumusan kebijakan Korea Utara. Keputusan untuk mengembangkan nuklir Korea Utara sering dinilai irasional oleh dunia internasional. Namun, pemimpin-pemimpin Korea Utara menilai itu sebagai sesuatu yang penting bagi kepentingan nasional, juga bagi citra pemimpin yang karismatik.

Pengembangan nuklir dimulai dengan membangunan kompleks fasilitas nuklir di Yongbyon atas inisiasi Kim Il Sung. Kelanjutannya semakin meningkat hingga sekarang nuklir Korea Utara juga digunakan sebagai basis persenjataan. Di masa pemerintahan Kim Jong Il, ancaman nuklir Korea Utara dinilai IAEA meningkat sehingga AS memutuskan untuk merespon melalui militernya.[[9]](#footnote-9) Akan tetapi, itu tidak menghentikan langkah Korea Utara untuk terus melanjutkan proyek nuklirnya. Desakan proliferasi IAEA dan ancaman sanksi dari Dewan Keamanan PBB tidak membuat Korea Utara gentar. Setelah suksesi kepresidenan dari Kim Jong Il menuju Kim Jong Un, Korea Utara semakin berani menunjukkan kekuatan nuklirnya. Pada Februari 2013, Korea Utara telah melakukan percobaan nuklir yang ketiga.[[10]](#footnote-10)

Pamer kekuatan nuklir seperti itu bisa dikatakan sebagai ambisi pemimpin Korea Utara untuk menunjukkan kekuatannya sebagai supreme leader.[[11]](#footnote-11)

Dalam rasionalitas Korea Utara mengembangkan nuklirnya adalah sejarah. Latar belakang historis Semenanjung Korea memperlihatkan bahwa ancaman keamanan akan selalu ada. Tidak hanya dari negara-negara tetangga yang kekuatannya semakin besar, tetapi juga dari negara-negara lain di luar kawasan Asia Timur. Terdapat fakta sejarah bahwa Korea menjadi tempat *proxy war* antara AS dengan Uni Soviet di masa Perang Dingin. Hal ini membuat Korea terpisah dan masih memunculkan kekhawatiran Korea Utara terhadap Korea Selatan. Ditambah lagi dengan negara-negara komunis yang dianggap sebagai *axis of evil* yang harus dijinakkan oleh AS. Hal ini menjadi ancaman besar bagi Korea Utara sehingga memunculkan kebijakan Korea Utara agar militer diperkuat. Itu disebut sebagai *Military First Politics* yang dimulai sejak tahun 1990-an.

Pertahanan militer kuat yang diinginkan Korea Utara tidak lepas dari persenjataan yang kuat pula. Pemerintah di Pyongyang pun memiliki pertimbangan untuk membangun kekuatannya melalui nuklir. Fokus yang dikembangkan adalah senjata nuklir dan misil balistik, meskipun tidak menutup potensi pada pengembangan roket juga. Pengembangan nuklir itu dijadikan sebagai deterrent terhadap intervensi militer AS di masa mendatang Pada akhirnya AS dan aliansinya justru ingin lebih ikut campur dalam hal proliferasi nuklir Korea Utara. Akan tetapi, setidaknya pengembangan nuklir itu menjadi rasional bagi Korea Utara untuk melindungi keamanan nasionalnya. Fasilitas nuklir terus dibangun sebagai benteng terhadap kemungkinan Korea Utara menjadi sasaran *pre-emptive nuclear strike* oleh AS.[[12]](#footnote-12)

Faktor yang mendasari rasionalitas Korea Utara dalam mengembangkan nuklir adalah kepentingan ekonomi. Hal ini awalnya hanya menjadi dugaan tentang alasan Korea Utara melakukan pengembangan nuklir. Namun, jika dilihat latar belakang kondisi domestik Korea Utara maka faktor tersebut bisa saja berpengaruh. Setelah Perang Korea berakhir, kemiskinan di Korea Utara mulai masif, sedangkan pemerintah masih menjalankan kolektivisasi lahan sehingga rakyat tidak bisa leluasa melakukan produksi. Hal ini menjadikan rakyat kesulitan dalam mengakses kebutuhan dasar terutama makanan, bahkan industrialisasi tidak membantu perbaikan taraf hidup penduduknya karena hanya mengutamakan *heavy indsutries*. Kebijakan untuk mengutamakan militer pun semakin memperparah kemiskinan. Ditambah lagi dengan tidak berjalannya pemikiran Juche yang mengandalkan *self-sufficiency* dan *self-reliace*. Ketika Uni Soviet lambat laun mengurangi bantuannya pada 1990-an, kemiskinan di Korea Utara semakin parah yang juga sebagai dampak banjir bandang.[[13]](#footnote-13)

Cara Korea Utara untuk dapat mempertahankan pembangunan kekuatan militer sekaligus mencari solusi kemiskinan adalah dengan terus mengembangkan nuklirnya. Desakan non-proliferasi dari dunia internasional menjadi kesempatan Korea Utara untuk bernegosiasi tentang materi. Ketika IAEA akan melakukan inspeksi nuklir, Korea Utara mengharapkan adanya imbalan berupa bantuan makanan dan bahan bakar dari China dan Korea Selatan. Untuk melakukan dialog pun, Korea Utara meminta AS mencairkan dana sebesar USD 25 juta yang disimpan di Macau dan sebelumnya telah dibekukan.[[14]](#footnote-14) Perlu diketahui bahwa Korea Utara memang memenuhi kebutuhan suplai makanan selain dari produksi dalam negeri dan impor, juga dari bantuan luar negeri. Bantuan-bantuan itu didapat dari badan PBB World Food Programme, AS, Korea Selatan, AS, Jepang, dan China.[[15]](#footnote-15)

Dari sudut pandang keamanan, pengembangan senjata nuklir oleh Korea Utara telah memunculkan rasa tidak aman di kawasan. Kepemilikan senjata dan pengembangan nuklir tersebut, menjadikan situasi kawasan berada dalam ketidakpastian. Kawasan Asia Timur menjadi dalam situasi security dillema, khususnya bagi Jepang dan Korea Selatan yang selalu merasa berada dalam ancaman serangan nuklir Korea Utara. Korea Selatan yang berada diantara dua negara ‘agresor’, yakni China dan Korea Utara yang sama-sama berkompeten dalam mengembangkan senjata nuklir strategis, merasa terancam dan memiliki ambisi yang sangat kuat pula untuk memiliki senjata nuklir dengan dalih membela diri.[[16]](#footnote-16) Namun, AS kembali memainkan peranannya untuk menekan Korea Selatan agar tidak memiliki senjata nuklir dikarenakan kekhawatiran AS akan situasi yang semakin rumit. Korea Utara dalam kepemilikan nuklirnya juga sangat menguntungkan China. China menggunakan Korea Utara sebagai sebuah *buffer zone* bagi para pesaingnya di Timur. Dengan menggunakan Korea Utara sebagai sebuah detterent, maka China mampu untuk fokus dalam usahanya mengembangkan perekonomiannya.

Pada bagian lain, ternyata uji coba senjata nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara juga membawa dampak negatif bagi China sendiri. Uji coba nuklir tersebut yang malah memprovokasi banyak pihak khususnya Barat, seperti AS, Uni Eropa, dan negara-negara Asia Timur lain, sehingga berdampak pada kesulitan China dalam mengembangkan kerja sama ekonomi dan perdagangannya dengan negara-negara Barat. Karena kandati pun China menggunakan sistem negara Komunis, akan tetapi dalam hal perekonomian China juga berimprovisasi menggunakan sistem liberal, bahkan tingkat investasi asing di China mencapai 800 milar USD. Pembangkangan yang dilakukan oleh Korea Utara yang mengingkari *Non-Proliferation Treaty* juga pada akhirnya membuat rezim NPT ini diragukan efektifitasnya dalam mengendalikan penggunaan dan peredaran senjata pemusnah massal ini. Mengingat hubungan dagang antara Korea Utara dan China tidak begitu signifikan. China sendiri apabila mengambil risiko, maka sanksi dari negara-negara Barat sebagai mitra perekonomiannya, akan membahayakan China dan dapat menjerumuskan China dalam stagnasi ekonomi.[[17]](#footnote-17)

Selanjutnya, pada aspek ekonomi, negara-negara di kawasan Asia Timur relatif tidak terganggu dengan munculnya krisis nuklir Korea Utara, dalam kurun waktu 1990-2000. Jepang sebagai salah satu kekuatan ekonomi lama di kawasan, menghadapi kerentanan. Perekonomian Jepang yang terafiliasi antara keiretsu dan bank-bank utama di Jepang. Meskipun perekonomian Jepang relatif stabil, namun Jepang juga menghadapi kemungkinan kehilangan *investasi stock market excange* dan *financial market*, sebagai dampak bila terjadi situasi genting di kawasan bila Korea Utara melakukan pembatalan gencatan senjata. Karena sistem teknologi saat ini semakin memudahkan setiap orang dalam bertransaksi seperti *flight money*, sehingga tidak menutup kemungkinan para investor akan dengan mudah memindahkan modal mereka ke negara lain yang dirasa lebih aman. Pada tahun 2006, Jepang masih menikmati keuggulan dari investasi modal asing sebesar dua puluh lima persen. Pemerintah Jepang juga sudah mulai menyadari pentingnya membuka investasi seluas-luasnya di negara lain. Sehingga hal ini juga berdampak pada sulitnya pemerintah Jepang untuk melakukan kontrol terhadap pasar, dan pengamanan modal bila sewaktu-waktu menerima sebuah kejutan negatif dari aksi Korea Utara.

Hal yang sama juga dialami oleh Korea Selatan sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Korea Utara. Korea Selatan relatif tidak begitu mengalami gangguan yang nyata dari Korea Utara meskipun tingkat kerapuhan begitu besar pada negara ini yang masih dalam status perang dengan Korea Utara. Selama krisis nuklir Korea Utara yang terjadi pada tahun 1993-1994, pemerintahan Seoul melakukan intervensi pada sistem keuangan dan ekonomi negara, dan hasilnya adalah bukan sebuah penurunan, melainkan terjadi peningkatan, dikarenakan adanya garansi dari pemerintah yang melakukan kontrol terhadap lembaga keuangan dan alur modal. Pasca krisis pada tahun 1998, dampak krisis nuklir Korea Utara mulai berhasil merubah pandangan masyarakat Korea Selatan yang mulai berpikir untuk memindahkan modalnya ke luar negeri. Namun, pada tahun 2000, pasar Korea Selatan, menjadi salah satu pasar saham dan modal tersibuk di dunia, sehingga menimbulkan potensi kepanikan yang lebih besar dibandingkan pada krisis nuklir pertama sebelum terjadinya krisis. Dengan demikian, pengaruh pengambilan kontrol penuh pasar modal dan investasi pemerintah Korea Selatan akan dilakukan apabila kondisi genting terjadi sebagai akibat ulah Korea Utara, meskipun pendapat ini masih diperdebatkan. Pemerintah Korea Selatan kemudian, hingga hari ini masih dibayang-bayangi ketidakpastian dan kekhawatiran akan ledakan perpindahan modal besar-besaran dari negaranya yang disebabkan oleh situasi yang kritis dan cenderung tidak menentu yang dihasilkan oleh Korea Utara.

Bagi kawasan Asia Timur sendiri, pengembangan nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara memberikan dampak signifikan. Dengan adanya ancaman dan agresifnya Korea Utara membuat para penstudi saling bertentangan dalam memandang dampak yang diakibatkan oleh isu nuklir ini. Mengingat Korea Utara dan China yang memiliki nuklir dan sangat agresif dalam pengembangan senjata-senjata berbasis nuklirnya untuk memperkuat keamanannya, negara-negara yang tidak memiliki nuklir sebagai senjata seperti Jepang dan Korea Selatan bukan tidak mungkin akan berpikir untuk mulai membangun program nuklir sebagai senjata. Bahkan China pun menyatakan dukungannya kepada Korea Selatan dan Jepang untuk mengubah kebijakannya dengan membangun persenjataan nuklir. Permasalahan semakin diperkeruh dengan adanya konflik-konflik dan sengketa-sengketa yang melibatkan beberapa negara Asia Timur yang dapat memungkinkan timbulnya peperangan. Bila melihat kenyataan seperti, maka isu nuklir di Asia Timur berimplikasi pada semakin menjauhnya negara-negara Asia Timur dari regionalisme.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai penggunaan nuklir Korea Utara terhadap stabilitas kawasan Asia Timur dalam bentuk skripsi, dengan berjudul **“PENGEMBANGAN NUKLIR KOREA UTARA IMPLIKASINYA TERHADAP STABILITAS KAWASAN ASIA TIMUR”.**

* 1. **Identifikasi Masalah.**
1. Bagaimana pengembangan nuklir di Korea Utara ?
2. Bagaimana kondisi stabilitas di Asia Timur pasca Korea Utara memiliki senjata nuklir?
3. Bagaimana pengaruh pengembangan nuklir Korea Utara terhadap stabilitas di kawasan Asia Timur ?
	1. **Pembatasan masalah.**

Mengingat luasnya permasalahan dan pembahasan yang akan di kemukakan, maka penulis membatasi permasalahan sejak Korea Utara mengembangkan progaram nuklirnya, hingga berpengaruh pada stabilitas kawasan Asia Timur.

* 1. **Perumusan Masalah.**

Bersarkan identifikasi masalah diatas, penulis merumuskan masalah, sebagai berikut : **“ Bagaimana pengembangan nuklir di Korea Utara terhadap stabilitas kawasan Asia Timur ”**

* 1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian.**

**1.5.1. Tujuan Penelitian.**

1. Mengetahui bagaimana nuklir korea.
2. Mengetahui kondisi stabilitas di kawasan Asia Timur pasca Korea Utara mempunya senjata nuklir.
3. Mengetahui pengaruh penggunaan nuklir Korea Utara terhadap stabilitas kawasan di Asia Timur.

**1.5.2. Kegunaan Penelitian.**

a) Menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan penelitian secara teroritis dan praktis mengenai nuklir Korea Utara.

b) Dapat memberikan gambaran kepada masayarakat luas mengenai nuklir Korea Utara terhadap stabilitas kawasan di Asia Timur.

c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang sangat hawatir atas pengembangan nuklir di Korea Utara.

d) Memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Strata (S1) pada Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan.

## 1.6. Kerangka Teori, Hipotesis Penelitian, Operasionalisasi Variable dan Skema Teoritik

### 1.6.1 Kerangka Teori.

Kebijakan yang di tempuh Korea Utara dalam memproduksi senjata nuklir untuk tujuan hubungan diplomatik menggambarkan tentang teori realis yang sangat berkaitan dengan kenyataan. Seorang ilmuan yang memiliki pemikirin ini yaitu Hans Morgenthau menjelaskan bahwa :

 **Negara bersifat anarkis dan sulit untuk di atur. Beberapa konsep teori realis yang mungkin akan menjelaskan lebih mendalam tentang nuklir Korea Utara. Konsep Hard Power, *National Interest, Nuclear Proliferation dan Security* Dilemma merupakan sejumlah konsep ayng berkaitan dengan hal ini. Dengan di tempuhnya kebijakan dalam memproduksi nuklir untuk tujuan diplomatik[[18]](#footnote-18).**

menjadikan Korea Utara negara yang menggunakan kekuatan militer yang dimiliki untuk kerjasama ataupun memaksa negara lain untuk membantunya dalam hal perekonomian.

 Menurut Barry Buzan :

  **Hal ini karena region tersebut saling berhubungan dengan negara-negara atau actor lain di luar region sehingga interaksi tersebut menimbulkan potensi konflik. Oleh sebab itu, keamanan regional merupakan hal pertama yang perlu diupayakan demi terciptanya stabilitas internasional. Kedua, keamanan regional sangat berhubungan dan mempengaruhi keamanan nasional negara yang terletak di dalam region yang bersangkutan[[19]](#footnote-19).**

 Menurut Buzan dan Herring :

 **Dinamika persenjataan juga disebabkan oleh model struktur domestik yang menyebutkan bahwa *the do mestic structure model rest one the idea that the arms dynamic is generated by forces within the state[[20]](#footnote-20).* Model struktur domestik ini memiliki gagasan bahwa dinamika persenjatan di sebabkan oleh kekuatan yang terdapat di dalam negeara itu sendiri, dapat di katakan bahwa dinamika pesenjataan lebih didorong oleh faktor-faktor internal. Model ini juga menempatkan pemicu dinamika persenjatan pada kondisi internal perekonomian, organisasional, dan politik dalam suatu negara.**

 Region dalam konsep ini bukanlah mengacu pada sebuah pengertian region secara teritori saja, akan tetapi lebih kepada sekumpulan unit yang memiliki proses sekuritisasi, desekuritisasi, atau bahkan keduanya sekaligus, yang memiliki interaksi satu sama lain. Dan kemudian menyebabkan masalah keamanan negara-negara Dalam bukunya, Region and Powers the Structure of International Security, Buzzan & Wæver, mengemukakan bahwa:

  **“*The central idea in RSCT is that, since most threats travel more easily over short distances than long ones, security interdependence is normally into regionally based clusters: security complexes. Process of securitization and thus the degree of security interdependence are more intense between actors inside such complexes than they are between actors inside the complex and outside of it*[[21]](#footnote-21)”**.

 Teori yang dikemukakan oleh Buzzan tersebut menggambarkan sebuah situasi bahwa ancaman yang ada dapat semakin mudah menyebar, baik pada jarak dekat maupun pada jarak yang jauh. Oleh karena itu, terjadilah suatu interdependesi keamanan dalam suatu kawasan, sehingga menjadikan keamanan tersebut menjadi semakin kompleks. Hal tersebut menyebabkan meningkatnya hubungan antar aktor yang terlibat, baik secara langsung di dalam kompleksitas tersebut ataupun aktor yang terlibat di luar kompleksitas keamanan yang sudah ada.

 Kompleksitas keamanan yang terjadi di kawasan Asia Timur terdapat interdependensi keamanan didalamnya. Isu-isu keamanan, baik tradisional maupun non-tradisional, yang terlingkup didalam kawasan Asia Timur ini akan menjadi fokus kajian dalam kompleksitas keamanan kali ini.

 Saling berkesinambungannya isu-isu keamanan tersebut menyebabkan negara-negara di kawasan Asia Timur memiliki sebuah interdependensi dalam hal pengaturan keamanan satu sama lain. Tidak hanya sebatas negara-negara yang berada di kawasan tersebut yang terlibat langsung dalam kompleksitas keamanan yang ada, namun juga pada negara-negara lain pun turut terlibat. Seperti contoh, negara-negara di kawasan Asia Tenggara, Asia Selatan dan AS pun juga berperan serta dalam interdependensi dan kompleksitas keamanan yang ada. Tidak dapat dianalisa secara terpisah satu sama lain

Di jelaskan oleh Hans J Morgenthau sebagai berikut:

 **Kepentingan nasional sebagai power (pengaruh, kekuasaan dan kekuatan) atau kemampuan minimum negara-negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultural dari gangguan negara-negara lain. Dari tinjauan itu, pemimpin suatau negara dapat menurunkan suatu kebijakan spesifik terhadap negara lain bersifat kerjasama maupun konflik.[[22]](#footnote-22)**

Dari identitas yang diciptakan dapat dirumuskan apa yang menjadi target dalam waktu dekat, bersifat sementara ataupun juga demi keberlangsungan jangka panjang. Kepentingan nasional dewasa ini mengarah pada masalah internal dari suatu bangsa. kepentingan nasional erat kaitannya dengan masalah kemanan, integritas dan posisi negara melalui perimbangan kekuatan. Apabila tercipta keamanan nasional maka kepentingan nasional akan muda terwujud. Kemanan nasional adalah bagian dari kepentingan nasional yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan tujuan politik luar negeri yaitu untuk mempertahankan kepentingan nasional berkaitan dengan mempertahankan keamanan nasional.

Dari identitas yang diciptakan dapat dirumuskan apa yang menjadi target dalam waktu dekat, bersifat sementara ataupun juga demi keberlangsungan jangka panjang. Kepentingan nasional dewasa ini mengarah pada masalah internal dari suatu bangsa. kepentingan nasional erat kaitannya dengan masalah kemanan, integritas dan posisi negara melalui perimbangan kekuatan. Apabila tercipta keamanan nasional maka kepentingan nasional akan muda terwujud. Kemanan nasional adalah bagian dari kepentingan nasional yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan tujuan politik luar negeri yaitu untuk mempertahankan kepentingan nasional berkaitan dengan mempertahankan keamanan nasional.

Di dalam konsep ini, terdapat tiga kepentingan inti yang secara mendasar dapat mendapatkan ancaman dari luar, yaitu; pertama, adalah *physical security* atau keamanan fisik dari masyarakat suatu negara dan hak milik pribadi mereka; yang kedua adalah *rules and institution* yang dilaksanakan suatu masyarakat negara, khususnya konstitusi dan aturan formal lainnya; ketiga adalah *prosperity* yaitu sumber modal, barang mentah, sistem keuangan dan lain-lain.[[23]](#footnote-23)

Konflik merupakan kondisi yang terjadi ketika dua pihak atau lebih menganggap perbedaan pendapat posisi yang tidak selaras dan tindakan salah satu pihak menghalangi atau mencampuri atau dalam beberapa hal membuat tujuan pihak lain kurang berhasil. Dalam setiap kelompok sosial selalu ada benih-benih pertentangan antar individu dan individu, kelompok dengan kelompok, individu dengan kelompok atau kelompok dengan pemerintah. Pertentangan ini biasanya berupa nonfisik tetapi dapat berkembang menjadi benturan fisik.

Menurut Kenneth Waltz :

***Balance of threat* adalah teori yang diusung oleh Stephen M. Walt dalam artikel berjudul "*Alliance Formation and the Balance of World Power*" yang diterbitan di jurnal International Security tahun 1985. Teori ini dijelaskan lebih lanjut dalam bukunya, "The Origins of Alliances" (1987). Teori keseimbangan ancaman memodifikasi teori keseimbangan kekuasaan dalam hubungan internasional aliran neo realis.[[24]](#footnote-24)**

Asumsinya pertama, Pengembangan nuklir oleh Korea Utara membuat negara-negara Asia Timur khawatir terhadap stabilitas kawasan. Kedua, Korea Utara membuat nuklir sebagai langkah untuk melindungi negaranya.

Menurut  [Bernard Brodie](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bernard_Brodie_(strategiwan_militer)&action=edit&redlink=1)

Teori deterensi mulai dikenal sebagai strategi militer pada masa [Perang Dingin](https://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Dingin) karena terkait dengan penggunaan [senjata nuklir](https://id.wikipedia.org/wiki/Senjata_nuklir). Deterensi memiliki arti yang unik waktu itu karena berkat kekuatan nuklir yang menghancurkan, sebuah negara nuklir kecil dapat mencegah serangan musuhnya yang jauh lebih kuat asalkan mereka terlindungi dari kehancuran melalui serangan kejutan.

 ***Deterensi* adalah strategi untuk**[**mencegah**](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Diplomasi_koersif&action=edit&redlink=1)**musuh mengambil tindakan yang belum dimulai, atau mencegah musuh melakukan sesuatu yang diharapkan negara lain.**

Pada tahun 1959, deteren nuklir yang tepat harus selalu disiagakan dan tidak pernah digunakan.[[25]](#footnote-25)

Menurut Robert Jervis**.**[[26]](#footnote-26), dilema keamanan merupakan situasi dan cara negara untuk berupaya meningkatkan keamanan dengan mengurangi tingkat keamanan negara lain sehingga dapat menciptakan konflik.

### 1.6.2 Hipotesis Penelitian.

 Berdasarkan kerangka pemikiran, perumusan masalah, serta asumsi yang penulis kemukakan di atas, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut : **“Jika Korea Utara tetap melakukan pengembangan nuklirnya dengan terus melakukan uji coba nuklirnya maka akan menciptakan instabilitas kawasan Asia Timur”.**

### 1.6.3. Operasionalisasi Variable.

Operasi variable dapat di urakan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1

Operasionalisasi Variabel

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel dalam Hipotesis | Indikator(Empirik) | Verifikasi(Analisis) |
| Variabel bebas : Jika Korea Utara melakukan pengembangan nuklirnya untuk memenuhi nasional interest | 1. Pengembangan nuklir
2. Memenuhi nasional interest
 | 1. Data dan fakta mengenai Korea Utara terus melakukan penelitian terkait nuklir

Andrew o’neil, “Nuclear Proliferation In Northeast Asia; the Quest for Security, (Palgrave Macmillan; Newyork) 20071. Korea Utara melakukan pengembangan bahan utama nuklir

Joseph S. Bermudez, Jr., “A History of Ballistic Missile Development in the DPRK,”Occasional Paper No. 2, (Center for Nonproliferation Studies, 1999)1. Korea Utara melakukan uji coba nuklir di Semenanjung Korea
2. Penggunaan nuklir untuk menjaga keamanan nasional Korea Utara

Lim Soo‐Ho, “Motives Behind NK’s Nuclear Weapons and Prospects for Denuclearizations,” SERI Quarterly;Jan2009, Vol. 2 Issue 41. Bargaining position Korea Utara di dunia internasional

Alexander Y. Mansourouv, “The Origins, Evolution and Future of The North Korean NuclearProgram”, dalam *Korea and World Affairs,* Vol. XIX No. 1, Spring 1995, |
| Variabel terikat : Maka tidak menciptakan stabilitas kawas Asia Timur | 1. Ancaman untuk negara tetangga
2. Stabilitas kawasan Asia Timur
3. Isu kedaulatan
 | 1. Negara tetangga khawatir terkait program nuklir Korea Utara bukan untuk tujuan damai

Samuel S. Kim, *The International Relations of Northeast Asia,* (USA: Rowman & LittlefieldPublishers, Inc. 2004),1. Negara tetangga mulai mencari bantuan internasional

Barry Buzan dan Ole Waefer, Regions and Power : The Structure of International Security, Oxford:Cambridge University Press, 2003,Tesis Farmaritia, A. W. (2010). Dampak Pengembangan Nuklir Korea Utara Terhadap Kompleksitas Keamanan Regional Asia Timur.Data dan fakta mengenai security dilemma1. Meningkatnya Perlombaan senjata antara negara-negara di Asia Timur
2. angaran militer negara-negara di kawasan Asia Timur

R. Jervis,‘Cooperation under the Security Dilemma,’ World Politics, vol. 30, no. 2, January 1978Data yang di kelola dari [Stock holm International Peace Research Institute](https://www.sipri.org/)Data dan fakta terkait claim perbatasan dan propaganda Korea Utara Claim perbatasan.Data dan fakta yang dikelola terkait konflik perbatasan dan propaganda diperoleh dari hasil rangkuman penelurusan peneliti dari berbagai sumber yang relevan. |

**1.6.4 Skema Kerangka Teoritik.**

Skema Kerangka Teoritik

Korea Utara

Nuklir

1. National interest

Dinamika Kawasan Asia timur

1. Ancaman keamanan.
2. Ancaman payung keamanan amerika di jepang dan korsel.
3. Perlombaan senjata.
4. Peningkatan anggaran militer.
5. Konflik perbatasan.
6. Konflik sejarah (paska perang dingin).

Alat analisis

1. Regional security complex theory
2. Balance of Power
3. Balance of Threat
4. Deterance
5. Security Dillema

Pengaruh terhadap instabilitas kawasan Asia Timur

## 1.7. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.

###  1.7.1 Metode Penelitian.

 Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Metode deskriptif analasis yaitu metode penelitian yang mengambarkan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa berdasarkan data dan fakta yang ada dan sedang berlangsung, untuk menghasilkan analisis mengenai moralitas dan keinginan kuat Korea Utara untuk mengembangkan nuklirnya tersebut untuk menjaga stabilitas kawasan di Asia Timur.
2. Metode historis analitis, yaitu metode yang di gunakan dalam menelaah terhadap kejadian-kejadian, perekermbangan dan pengalaman masa lalu serta merupakan interprestasi dari data yang tersedia, di mana metode historis ini bertujuan mengkostruksi masa lalu secara sistematis dengan mengumpulkan dan mengklasifikasikan semua bukti untuk menetapkan fakta dan mencapai konklusi yang dapat di pertahankan sehubungan dengan adanya sikap intervensi dari PBB untung menghetikan perkembangan nuklir di Korea Utara untuk menjaga stabilitas di kawasa Asia Timur.

###  1.7.2 Teknik Pengumpulan Data.

Adapun teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang di lakukan dengan cara mempelajari dan mengkaji permasalahan-permasalahan melalui buku-buku, jurnal, dokumen-dokumen serta bahan bacaan lainnya sebagai pegangan serta berkaitan dengan sasaran penelitian.

## 1.8 Lokasi dan Lamanya Penelitian.

###  1.8.1 Lokasi penelitian.

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dan informasi yang bersumber dari berbagai tempat di ataranya :

1. Perpustakaan FISIP UNPAS Jalan Lengkong Besar No.68 Bandung.
2. Perpustakaan UNPAR Jalan Ciumbuleuit No.94, Hegarmanah, Cidadap, Bandung.

### 1.8.2 Lamanya Penelitian.



## 1.9 Sistematika Penulisan.

Sistematika penelitian ini terdiri dari 5 Bab dari masing-masing bab akan dibagi menjadi beberapa sub bab yang akan mejelaskan sebagai secara detail. Berikut adalah sistematika penulisannya:

 BAB 1 : Pendahuluan.

 Berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, jadwal dan kegiatan penelitian, sistematika penelitian.

 BAB 2 : Pembahasan Variabel Bebas.

 Berisi tentang Korea Utara tentang pengembangan nuklirnya bagi stabilitas di kawasan Asia Timur.

 BAB 3 : Pembahasan Variabel Terikat

 Berisi tentang pembahasan mengapa Korea Utara menggunakan nuklirnya untuk menjaga stabilitas kawasin di Asia Timur.

 BAB 4 : Pembahasan Analisis

 Berisi tentang analisa atas variabel bebas dan terikat dengan menguraikan indikator-indikator variabel dengan menggunakan metode dan teknik penelitian.

 BAB 5 : Kesimpulan

 Meliputi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang di bahas.

1. Sagan, Scott D., Why Do Stated Build Nuclear Weapon?: Three Models in Search of A Bomb, International Security, Vol. 21, No. 3 (Winter, 1996-1997), hlm. 497. [↑](#footnote-ref-1)
2. Fukuyama, Francis & Kongdan Oh, 1993. The US-Security After The Cold War, National Defenseresearch Institute, prepared for the UnderSecretary of Defense for policy,hlm. 26-28 [↑](#footnote-ref-2)
3. Tan, Er-Win, 2013. The US Versusthe North Korean Nuclear Threat. Abingdon, Oxon: Routledge. Hlm 78 [↑](#footnote-ref-3)
4. Anon, 2006. International Risk, North Korea’s Nuclear Test: The Logic Behind the Leadership’s Action andLikely Future Development. Hlm 57 [↑](#footnote-ref-4)
5. Nuklir Sebagai Alat Diplomasi ( Diplomasi Koersif Korea Utara Dalam Politik Internasional ) http://fisip.unand.ac.id/hi/blog/?p=260. Diakses pada tanggal 3 Januari 2017 [↑](#footnote-ref-5)
6. [http://dunia.vivanews.com/news/read/66277-dk\_pbb\_tetapkan\_sanksi\_baru\_untuk\_Korea Utara](http://dunia.vivanews.com/news/read/66277-dk_pbb_tetapkan_sanksi_baru_untuk_korut). Di akses pada tanggal 3 Januari 2017 [↑](#footnote-ref-6)
7. 7 [http://www.surya.co.id/2009/06/14.eresolusi-terbaru-dk-pbb-embargo-Korea Utara-diperluas.html](http://www.surya.co.id/2009/06/14.eresolusi-terbaru-dk-pbb-embargo-korut-diperluas.html) Di akses pada tanggal 4 januari 2017 [↑](#footnote-ref-7)
8. Park, Ki Tae, 2010.Analyzing North Korea’s Decision-Making Process on its Nuclear Weapons Programs with the Rational Choice and Cognitive Models. Disertasi. Santa Monica: Pardee Rand Graduate School. Hal 64 [↑](#footnote-ref-8)
9. PBS, 2014. Kim's Nuclear Gamble dalam <http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/kim/etc/cron.html> di akses 4 Januari 2017 [↑](#footnote-ref-9)
10. Joo, Sung Ha, 2013. What's Kim Jong Un's intention with the nuclear test?  dalam <http://edition.cnn.com/2013/02/15/opinion/north-korea-intention/> di akses 4 Januari 2017 [↑](#footnote-ref-10)
11. Seth, Michael J., 2011. A History of Korea: From Antiquity to Present. [e-book] Lanham: Rowman and Littlefield Publisher, Inc. Hal 43 [↑](#footnote-ref-11)
12. Pinkston, DA, 2002. North Korean Motivations for Developing Nuclear Weapons. [e-book] dalam cns.miis.edu/north\_korea/dprkmotv.pdf di akses 4 Januari 2017 [↑](#footnote-ref-12)
13. Seth, Michael J., 2011. A History of Korea: From Antiquity to Present. [e-book] Lanham: Rowman and Littlefield Publisher, Inc. Hal 23 [↑](#footnote-ref-13)
14. Hartati, Anna Yulia, 2013. PropagandaNuklirKorea Utara: Studi Perlawanan Korea Utara terhadap AS. Laporan Penelitian. Semarang: Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim. Hal 17 [↑](#footnote-ref-14)
15. Haggard, Stephan, dan Marcus Noland, 2005. Hunger and Human Rights: The Politics of Famine in North Korea. [e-book] Washington, DC: U.S. Committee for Human Rights in North Korea. Hal 78 [↑](#footnote-ref-15)
16. Side, Hu  & Sun Xiangli et all, 2003. On The Nuclear Issue of North Korea. materi di presentasikan pada The XV International Amaldi Conference in Helsinki, 25-27 September 2003. [↑](#footnote-ref-16)
17. Noland, Marcus, 2006. The Economic Implications of a North Korean Nuclear Test. Asia Policy no. 2, pp. 1-39. [↑](#footnote-ref-17)
18. Nuklir Sebagai Alat Diplomasi ( Diplomasi Koersif Korea Utara Dalam Politik Internasional ) <http://fisip.unand.ac.id/hi/blog/?p=260>. Di akses pada tanggal 4 Januari 2017 [↑](#footnote-ref-18)
19. Buzan, Barry. *People, States, and Fear: An Agenda for International Security Studies in Post-Cold war era*. London : Pinter. 1983. [↑](#footnote-ref-19)
20. Barry Buzan & Eric Herring, Op.Cit. hlm 101 [↑](#footnote-ref-20)
21. Barry Buzan dan Ole Waefer, Regions and Power : The Structure of International Security, Oxford:Cambridge University Press, 2003, hal. 44-45 [↑](#footnote-ref-21)
22. Coloumbus, Theodore A. and James H. Wolfe. 1981.” Introduction to International Relations, Power and Justice. New Delhi: Prentice Hall of India”. [↑](#footnote-ref-22)
23. T May Rudy. Studi Strategis, Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin. Bandung: PT.Refika Aditama, 2002, hlm.65 [↑](#footnote-ref-23)
24. Walt, Stephen: [Alliance Formation and the Balance of World Power](http://www.christoph-rohde.de/waltallianceformationandbop1985.pdf) [↑](#footnote-ref-24)
25. Brodie, Bernard (1959), "8", *"The Anatomy of Deterrence" as found in Strategy in the Missile Age*, Princeton: Princeton University Press, pp. 264–304 [↑](#footnote-ref-25)
26. R. Jervis,‘Cooperation under the Security Dilemma,’ World Politics, vol. 30, no. 2, January 1978, hlm 167 [↑](#footnote-ref-26)